

**DIKTAT**

**TEORI-TEORI PEMBANGUNAN**

**O  
L  
E  
H**

**DRS. BADRUDDIN NASIR, M.Si**

**NIP. 196412311993031022**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Diklat : Teori-Teori Pembangunan

2. Penyusun

- a. Nama : Drs. Badruddin Nasir, M.Si  
b. NIP : 195412311293031022  
c. Pangkat/Gol : Pembina Muda Tingkat I/ IV.c  
d. Jahatan : Lektor Kepala  
e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
f. Prodi : Sosiatri

Samarinda, 26 Juli 2021

Menyetujui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Noor, M.Si  
NIP. 19600817198611001

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>4</b>
<b>Pengertian Pembangunan</b> .....	<b>5</b>
<b>A. Definisi Pembangunan Menurut Para Ahli</b> .....	<b>16</b>
<b>B. Teori-teori Pembangunan</b> ... ..	<b>20</b>
<b>C. Sejarah Teori Pembangunan</b> .....	<b>37</b>
<b>D. Pembangunan yang tepat diterapkan di Indonesia</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
<b>Kesimpulan</b> .....	<b>50</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan secara menyeluruh sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Berbagai pengalaman berharga diperoleh selama mengisi kemerdekaan tersebut dan menjadi pelajaran berharga untuk melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia: memajukan kesejahteraan umum: mencerdaskan

kehidupan bangsa: dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2007). Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.1/2)

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan seringkali diarahkan pada pertumbuhan di bidang ekonomi atau kemajuan material. Namun pada kenyataannya, pembangunan di bidang ekonomi saja belum cukup untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, karena malah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan

akibat kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi sumber, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan di bidang sosial pun perlu dilaksanakan.

Persoalan pembangunan adalah suatu persoalan besar yang mempunyai kesan mendalam dan menjangkau jauh ke atas kehidupan manusia sejagat khususnya rakyat Dunia Ketiga, terutamanya sejak Perang Dunia Kedua. Walau bagaimanapun, terdapat pandangan yang berbeda berhubung dengan konsep, teori, strategi dan pendekatan pembangunan, serta pengalaman yang berbeda di kalangan pelbagai negara dari segi praktik pembangunan.<sup>2(4)</sup> Selain itu pembangunan (developmentalism) dianggap sebagai siasat negara-negara maju untuk memuluskan jalan mereka mendominasi perekonomian dunia pasca berakhirnya era kolonialis.<sup>3[5]</sup>

Pembangunan membutuhkan kemandirian, akan tetapi tidak menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Pembangunan nasional akan lebih merupakan pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan di Indonesia. Permintaan efektif atau daya-beli rakyat di dalam negeri harus menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ini bermakna bahwa strategi pembangunan pertumbuhan melalui pemerataan atau pertumbuhan dengan pemerataan yang berorientasi ke dalam negeri. Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Reformasi dalam konteks kenegaraan tidak saja berarti pembaharuan menuju Indonesia maju dan terbentuknya civil society tetapi juga mengandung arti back to basics, kembali ke rel sesuai dengan cita-cita Kemerdekaan Indonesia.

Apabila mencermati pembangunan yang terjadi di Indonesia sejatinya masih tingginya disparitas (kesenjangan) antar wilayah. Hal ini terlihat dari segi kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, sampai tingkat kemiskinan yang begitu timpang. Maka tidaklah salah apabila Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, mengatakan bahwa kalau dilihat lebih detail, pada tingkat regional provinsi, kabupaten, dan kota ada disparitas. Di satu sisi, banyak daerah yang mencapai peningkatan ekonomi signifikan, tetapi di lain pihak banyak daerah yang masih jauh, dipasritas sangat tinggi.

Berbicara kesenjangan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sebetulnya presdisen Joke Widodo melalui visi misi Nawacita visi-misi Nawacita yaitu mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, antara lain Tujuan Nomor 10 tentang Penurunan Ketimpangan: Tujuan Nomor 16 tentang Tata Kelola Pemerintahan, Perdamaian dan Keadilan, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan Indonesia se utuhnya.

Salah satu solusi terhadap kesenjangan dan kesejahteraan pembangunan, maka pemerintah menganggap penting kerjasama global seperti Sustainable Development Goals (SDGs). pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan Sustainable Development Goals (SDG5), dan komitmen itu antara lain diwujudkan melalui program dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Bappenas. Namun, implementasinya masih belum terjadi di lapangan.

Masalah lain yang lebih krusial lagi terkait pembangunan di Indonesia adalah problem kemandirian dalam pembiayaan dimana ketergantungan bangsa terhadap lembaga-lembaga internasional (misalnya IMF) atau negara asing. Ketergantungan yang dirasakan semakin meningkat.

Terkait persoalan tersebut diatas penulis mencoba mengulas pendekatan pembangunan dengan menggunakan analisa teori pembangunan. “Teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu teori modernisasi, teori dependensi, dan teori sistem dunia. Pada kesempatan ini peneliti akan membahas dan mencoba melakukan analisa dengan ketiga teori tersebut dan mencoba menyimpulkan teori yang sesuai dengan kondisi Indonesia sekarang ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa itu Pembangunan dan bagaimana definisi Pembangunan menurut para ahli?
2. Bagaimanakah Teori dari Pembangunan dan bagaimana sejarahnya?
3. Bagaimana pembangunan yang tepat diuntuk Indonesia dan bagaimana perkembangannya?

## **C. Tujuan**

- I. Agar mengetahui apa itu Pembangunan beserta teorinya
2. Supaya mengetahui proses, perkembangan, serta sejarah Pembangunan di Indonesia



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENGERTIAN PEMBANGUNAN**

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk penambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006:89), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah developmem, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interprettable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari development adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (underdevelopment) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994), Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tematemata pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai ‘suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan

dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi. Dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme. Disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para Ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus

memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

- **Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan**

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000: *today*, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap

awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.



Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, Jink and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau panting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (sel/reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis (ethnodevelopment) (Kuncoro, 2003). paradigma ini secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Para proponent strategi “pertumbuhan dengan distribusi”, atau “redistribusi dari pertumbuhan”, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar “kue” pembangunan) namun

juga mempertimbangkan bagaimana distribusi “kue” pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.

2. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam “jaminan” agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.
3. Pembangunan “mandiri” telah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep “Tata Ekonomi Dunia Baru” (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.
4. Pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi: namun yang paling utama adalah, strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.
5. Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep ecodevelopment dalam formulasi Kebijakan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, Parkinson, & Saniman, 1990 dalam Kuncoro, 2004).

- **Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan**

Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan,

dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada factor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau POLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

### **1. Pendapatan perkapita**

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

## **2. Struktur Ekonomi**

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial, Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak , kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

## **3. Urbanisasi**

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

## **4. Angka Tabungan**

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggeris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang

memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

## **5. Indeks Kualitas Hidup**

IKH atau Physical Quality of Life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

## **6. Indeks Pembangunan Manusia.**

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah

proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan Imowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

## **B. DEFINISI PEMBANGUNAN MENURUT PARA AHLI**

### **a. Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah**

Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

### **b. Siagian**

Menurutnya suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”.

**c. Ginanjar Kartasasmita**

Memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

**d. Alexander**

Pembangunan “development” ialah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

**e. Portes**

Menurutnya pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

**f. Deddy T. Tikson**

Bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

**g. Sukirno**

Bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

**h. Rogers**

Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material “termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai” untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

### **i. Inayatullah**

Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

### **j. Shoemaker**

Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.

### **k. Kleinjans**

Pembangunan ialah suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

### **l. Mohammad Ali**

Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia.

### **m. Seers**

Pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknik yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran dan ketidakadilan dalam bidang sosial.



#### **n. Rogers dan Shoemaker**

Pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.

#### **o. Drs. Joko Untoro**

Menurutnya pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan di dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi atau upaya menaikkan pendapatan per kapita.

#### **p. H. Hoed**

Menurutnya pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

#### **q. Dissaynake**

Menurutnya pembangunan merupakan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.

#### **r. Fakhri**

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

#### **s. Galtung**

Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.

#### **t. Katz**

Mengatakan pembangunan yang besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih bernilai “pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan bangsa “national building” atau perkembangan sosial ekonomi. Maka untuk mencapai pembangunan yang telah dicangkan selama ini bahwa dapat berjalan sesuai harapan bersama bahwa kepentingan kesejahteraan manusia menjadi fokus sentral dari pembangunan dimana pelaksanaan pembangunan masyarakatlah yang menentukan tujuan, sumber-sumber pengawasan dan pengarahannya proses-proses pelaksanaan pembangunan.

#### **u. Effendi**

Menurutnya pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

### **C. TEORI-TEORI PEMBANGUNAN**

Suatu negara memiliki kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang masih bergantung pada negara lain, ada yang sebatas mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan ada yang telah mampu memberi bantuan kepada negara lain. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pengelompokan-pengelompokan negara berdasarkan kondisi sosial ekonominya.

Suatu negara dapat disebut negara berkembang atau negara maju didasarkan pada keberhasilan pembangunan oleh negara yang bersangkutan. Suatu negara digolongkan sebagai Negara berkembang jika negara tersebut belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, Adapun suatu negara digolongkan sebagai negara maju jika negara tersebut telah mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud, baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik.

Seperti yang telah diketahui bahwa negara-negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, Prancis ataupun Jerman disebut sebagai negara maju. Kemajuan negara-negara tersebut dapat dilihat dari banyaknya kota-kota metropolitan yang dicirikan dengan kondisi fisik berupa banyaknya bangunan atau gedung-gedung tinggi sebagai kawasan industri dan perkantoran. Hal tersebut dikarenakan mayoritas negara maju perekonomiannya bertumpu pada sektor industri, jasa dan perdagangan. Adapun negara-negara seperti Afrika Selatan, India, Pakistan, Laos, Malaysia, dan termasuk negara Indonesia disebut negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya bercorak agraris, karena masih banyak ditemui lahan pertanian yang luas dan subur. Mengungkap persoalan ketergantungan pembangunan di Indonesia pada negara maju dapat ditelaah lebih dalam dengan pendekatan teori pembangunan. Teori

pembangunan itu sendiri adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan pada awalnya muncul ketika muncul keinginan dari negara-negara maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Pada perkembangannya teori pembangunan berkembang dan mempunyai beragam pendekatan yang memberikan kritik satu dengan yang lain. 4(6) Oleh para ahli, teori-teori pembangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu teori modernisasi, tahap dependensi, teori sistem dunia.

Pada tahap pertama muncul teori modernisasi. Teori ini muncul di Amerika Serikat yang mengaplikasikannya dalam program Marshal Plan. Teori modern dibagi menjadi teori modern klasik dan teori modern baru. Teori modern klasik memberikan pembenaran mengenai hubungan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Teori ini menyoroti bahwa negara dunia ketiga merupakan negara terbelakang dengan masyarakat tradisionalnya. Sementara negara-negara barat dilihat sebagai negara modern. Teori ini memberikan saran bahwa negaranegara berkembang harus meninggalkan nilai-nilai tradisionalnya agar dapat keluar dari berbagai permasalahan, seperti kemiskinan. Teori ini juga menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara Dunia ketiga. Satu hal yang menonjol dari teori modernisasi klasik ini adalah, modernisasi lebih menekankan faktor internal sebagai akibat dari masalah dalam masyarakat itu sendiri. Teori modern baru kemudian mengkritik seluruh jawaban dari teori modernisasi klasik.

Hal ini dikarenakan teori modernisasi klasik terlalu berorientasi ke Barat, terlalu optimis, mensahkan dominasi Barat di dunia ketiga, dan menolak tradisi. Teori modern baru ini berasumsi bahwa tradisi dapat memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi. Karena pola pembangunan ini tidak memberi kepuasan, maka kemudian lahir teori ketergantungan/dependensi, yang memiliki sisi pandang dari negaranegara dunia ketiga yang berada dalam posisi tergantung terhadap negara-negara maju.

Teori dependensi menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Teori ini mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Teori ini menyatakan bahwa karena sentuhan modernisasi itulah negara-negara dunia ketiga kemudian mengalami kemunduran (keterbelakangan). Secara ekstrim, dikatakan bahwa kemajuan atau kemakmuran dari negara-negara maju pada kenyataannya menyebabkan keterbelakangan dari negara-negara lainnya. Hal ini dilihat dari kegagalan program dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin (KEPBBAL) pada awal 1960-an. Program ini dimulai tahun 1950-an saat banyak negara Amerika Latin menerapkan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada proses industrialisasi melalui program Industrialisasi Substitusi Import (ISI). Strategi pembangunan tersebut diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil pembangunan. Namun, yang muncul kemudian adalah terjadinya stagnasi ekonomi yang ditandai dengan adanya masalah pengangguran, inflasi, devaluasi, penurunan nilai perdagangan, dan lainnya. Kondisi ini menimbulkan gerakan perlawanan dari rakyat dan tumbangny pemerintah di beberapa negara. Secara filosofis, teori dependensi memiliki kehendak untuk meninjau kembali pengertian dari pembangunan. Pembangunan tidak tepat untuk diartikan sebagai sekedar proses industrialisasi, peningkatan output, dan peningkatan produktivitas. Bagi teori dependensi, pembangunan lebih tepat diartikan sebagai peningkatan standar hidup bagi setiap penduduk di negara Dunia Ketiga. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar pelaksanaan program yang melayani kepentingan elit dan penduduk perkotaan, tetapi lebih merupakan program yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk pedesaan, para pencari kerja, dan kelas sosial lainnya yang membutuhkan bantuan.

Teori terakhir adalah teori sistem dunia. Teori ini memiliki pandangan bahwa dunia merupakan sebuah sistem yang sangat kuat yang mencakup seluruh negara di dunia, yaitu sistem kapitalisme. Di dalam teori ini, adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara, yaitu negara sentral, negara semi pinggiran, dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya memiliki tujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran dalam melaksanakan salah satu strategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan, dan strategi berdiri di atas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara semi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran dalam melakukan perluasan pasar serta pengenalan teknologi modern. Selain itu, juga memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar internasional melalui perang harga dan kualitas.

Dari penjelasan masing-masing teori pembangunan tersebut, teori modernisasi tidak cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep pembangunan masyarakat dengan teori modernisasi ini kurang mendasar pada masyarakat Indonesia. Modernisasi identik dengan pertumbuhan ekonomi, dan melupakan budaya yang membangun kehidupan masyarakat. Masyarakat menerima berbagai perubahan di dalam kehidupannya sebagai akibat dari modernisasi, seperti gaya hidup, fasilitas-fasilitas modern seperti mall, diskotik, cafe, dan lain sebagainya. Sementara di tengah-tengah perubahan yang terjadi, masyarakat belum mampu untuk meninggalkan bentuk-bentuk tradisi lamanya. Akibatnya, timbul ketimpangan sosial dalam masyarakat tersebut.

Menurut teori modernisasi, masyarakat Indonesia pada umumnya belum siap untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh. Proses pembangunan terhambat oleh nilai-nilai budaya dan mentalitas masyarakat Indonesia, seperti nilai budaya yang tidak mementingkan mutu atau prestasi, tidak mampu meninggalkan otoritas tradisinya, menganggap hidup selaras dengan alam sehingga timbul konsep tentang nasib, tidak disiplin, kurang bertanggungjawab, tidak berani menanggung resiko, dan lain-lain. Inilah sebabnya negara Indonesia sebagai negara dunia ketiga mengalami keterbelakangan. Di sini terlihat jelas bahwa teori modernisasi ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia.

Teori selanjutnya adalah teori dependensi atau ketergantungan. Jika dikaitkan dengan teori ini, pembangunan di Indonesia bisa saja, yaitu dengan menggantungkan pembiayaannya dari batuan luar negeri, dinamakan negara pemberi bantuan tersebut dinamakan negara pusat, sebagai modal asing. Pemberian modal asing ini merupakan sesuatu yang diharuskan bagi negara pusat untuk membantu kemajuan Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, pemberian bantuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan awal yang telah disepakati oleh negara-negara pusat. Pemberian modal asing ini dijadikan sebagai jalan bagi negara-negara maju untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besar dari negara yang mendapat bantuan, seperti Indonesia. Dampak dari konsekuensi dari pemberian bantuan, berupa eksploitasi sumberdaya alam dan pengambilan keuntungan lainnya dari proses pembangunan, menjadikan Indonesia secara perlahan semakin terpuruk kedalam jurang kemiskinan, dikarenakan utang yang membebani semakin banyak. Kekayaan alam yang melimpah di tanah air Indonesia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, dikarenakan posisi lemah sebagai negara yang memiliki hutang pada negara-negara maju. PT. Freeport di Papua, sebagai contoh, telah mengeksploitasi hampir seluruh sumberdaya mineral berharga yang terdeposit di Papua untuk kepentingan negaranya. Ini contoh kerugian besar bagi bangsa Indonesia, akibat dependensi

terhadap bantuan luar negeri. Di sini terlihat jelas pula, bahwa teori dependensi ini tidak menguntungkan Indonesia.

Teori yang terakhir adalah teori sistem dunia. Dalam teori ini negara di dunia dibagi atas tiga bentuk negara, yaitu: negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Teori ini mengasumsikan hubungan harmonis secara ekonomi yang terjadi di antara negara-negara yang terlibat, yang memberikan kesempatan kepada dua kelompok negara, yaitu semi pinggiran dan pinggiran untuk dapat merubah statusnya menjadi negara sentral yang mapan secara ekonomi. Dalam kajiannya Wahyu Ishardino S., (1), disampaikan bahwa perubahan status negara pinggiran menuju semi pinggian ditentukan oleh keberhasilan negara-negara tersebut melaksanakan strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, dan strategi lainnya dalam proses pembangunannya. Sementara itu, upaya yang harus dilakukan oleh negara semi pinggiran untuk dapat menuju negara sentral, adalah memperluas pasar dengan memperkenalkan teknologi modern, dan mampu mempersaingkan produknya dari segi harga dan kualitas.

Indonesia termasuk dalam kategori mana? Secara umum, Indonesia masih berada dalam kategori negara pinggiran. Karena dari segi kegiatan produksi, hampir 90% bahan bakunya bergantung pada import. Dengan demikian, kemampuan untuk berperang dari segi harga dan kualitas dengan produk luar negeri masih sangat rendah. Pertumbuhan jumlah dan jenis industri yang ada di Indonesia tidak sejalan dengan pertumbuhan kesejahteraan nasional, namun yang terjadi malah sebaliknya. Sektor industri yang tumbuh di Indonesia didominasi oleh perusahaan asing yang mengoperasikan produksinya di Indonesia, dikarenakan ketersediaan bahan dasar (raw materials) yang siap diolah menjadi bahan baku oleh perusahaan mereka sendiri dan rendahnya upah tenaga kerja lokal.



Indonesia belum mampu secara mandiri mengolah sumberdaya alamnya menjadi produk antara (intermediate products) dan bahkan produk barang jadi. Konsekuensinya, hampir semua kegiatan produksi masih bergantung pada supply produk luar negeri. Walaupun demikian, dengan teori sistem dunia, Indonesia masih punya harapan untuk mendapatkan peluang lebih baik, yaitu mandiri di sektor bahan baku industri dan tidak hanya bertindak sebagai pasar bagi bertubi-tubinya produk asing datang ke dalam negeri ini. Dengan memperkuat kemampuan pengolahan sumberdaya alam yang ada, melaksanakan regulasi yang kondusif bagi usaha dalam negeri, maka peluang Indonesia dari yang berkategori negara pinggiran dapat bangkit menjadi negara semi pinggiran bahkan menjadi negara sentral yang maju dan berdaulat secara ekonomi.

Berdasarkan ketiga teori yang telah dibahas diatas, teori sistem dunia merupakan harapan Indonesia untuk memperoleh peluang mendapatkan posisi yang lebih baik untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik pula.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidakimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidakimbang. Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231).

Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

Teori Ketergantungan yang dikembangkan pada akhir 1950an di bawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Raul Prebisch. Prebisch dan rekan-rekannya di picu oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju tidak harus menyebabkan pertumbuhan di negara-negara miskin. Memang, studi mereka menyarankan bahwa kegiatan ekonomi di negara-negara kaya sering menyebabkan masalah ekonomi yang serius di negara-negara miskin. Kemungkinan seperti itu tidak diprediksi oleh teori neoklasik, yang diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua, bahkan jika tidak bermanfaat tidak selalu ditanggung bersama. Penjelasan awal Prebisch untuk fenomena ini sangat jelas: negara-negara miskin mengekspor komoditas primer ke negara-negara kaya yang kemudian diproduksi produk dari komoditas tersebut dan mereka jual kembali ke negara-negara miskin.

Tiga masalah membuat kebijakan ini sulit untuk diikuti. Yang pertama adalah bahwa pasar internal negara-negara miskin tidak cukup besar untuk mendukung skala ekonomi yang digunakan oleh negara-negara kaya untuk menjaga harga rendah. Isu kedua menyangkut akan politik negara-negara miskin untuk apakah transformasi menjadi produsen utama produk itu mungkin atau diinginkan. Isu terakhir berkisar sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kendali produk utama mereka, khususnya di bidang penjualan produk-produk luar negeri. Hambatan-hambatan dengan kebijakan substitusi impor menyebabkan orang lain berpikir sedikit lebih kreatif dan historis pada hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.

- **PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN**

## **1. Teori Modernisasi**

### **a. Sejarah Singkat**

Tanggal 20 Januari 1949, Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman kali pertama menyitir istilah “developmentalism”, Untuk selanjutnya, ia mempropagandakan istilah under-development bagi negara-negara bekas jajahan agar mampu meredam pengaruh Komunisme-Sosialisme sebagai tawaran ideologi pembangunan, (Stephen Gill, 1993:248) Teori Modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara Dunia Ketiga. Kelompok negara miskin yang ada dalam istilah Dunia Ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang menjadi bahan rebutan pelaku Perang Dunia II. Sebagai negara yang telah mendapatkan pengalaman sekian waktu sebagai negara jajahan, kelompok Dunia Ketiga berupaya melakukan pembangunan untuk menjawab pekerjaan rumah mereka yaitu kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, pendidikan rendah, rusaknya lingkungan, kebodohan, dan beberapa problem lain.

### **b. Asumsi Dasar Modernisasi**

Secara etimologis, ada beberapa tokoh yang mengajukan pendapat tentang makna modernisasi. Everett M. Rogers dalam “Modernization Among Peasants: The 10 Impact of Communication” menyatakan bahwa modernisasi merupakan proses dimana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis serta cepat berubah. Cyril E. Black dalam “Dynamics of Modernization” berpendapat bahwa secara historis modernisasi adalah proses perkembangan lembaga-lembaga secara perlahan disesuaikan dengan

perubahan fungsi secara cepat dan menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia. Dengan pengetahuan tersebut, akan memungkinkan manusia untuk menguasai lingkungannya dan melakukan revolusi ilmiah. Daniel Lerner dalam "The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East?" menyatakan bahwa modernisasi merupakan suatu trend unilateral yang sekuler dalam mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan. Marion Ievy dalam "Modernization and the Structure of Societies" juga menyatakan bahwa modernisasi adalah adanya penggunaan ukuran rasio sumberdaya kekuasaan, jika makin tinggi rasio tersebut, maka modernisasi akan semakin mungkin terjadi.

Dari beberapa definisi tersebut, modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah upaya tindakan menuju perbaikan dari kondisi sebelumnya. Selain upaya, modernisasi juga berarti proses yang memiliki tahapan dan waktu tertentu dan terukur.

Sebagaimana sebuah teori, Modernisasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. Pertama, kemiskinan dipandang oleh Modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman, 2000:18).

Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan

layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain.

Kedua, muara segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang kali pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut Modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour Fakih, 2002:44-47).

Teori Modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Teori tindakan Talcott Parsons 'mendefinisikan kualitas yang membedakan "modern" dan "tradisional" masyarakat. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk menciptakan individu modern. Teknologi memainkan peran kunci dalam teori pembangunan karena diyakini bahwa teknologi ini dikembangkan dan diperkenalkan kepada negara-negara maju yang lebih rendah akan memacu pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor kunci dalam Teori Modernisasi adalah keyakinan bahwa pembangunan memerlukan bantuan dari negaranegara maju untuk membantu negara-negara berkembang untuk belajar dari perkembangan mereka. Dengan demikian, teori ini dibangun di atas teori bahwa ada kemungkinan untuk pengembangan yang sama dicapai antara negara maju dan dikembangkan lebih rendah.

### c. Teori Dependensi (Ketergantungan)

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

Paradigma inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negaranegara Dunia Ketiga bukan disebabkan oleh faktor internal di negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara Dunia Ketiga itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga. Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Keterbelakangan jilid dua di negara Dunia Ketiga ini disebabkan oleh ketergantungan yang diciptakan oleh Campur tangan negara maju kepada negara Dunia Ketiga. Jika pembangunan ingin berhasil, maka ketergantungan ini harus diputus dan biarkan negara | Dunia Ketiga melakukan roda pembangunannya secara mandiri. Ada dua hal utama dalam masalah pembangunan yang menjadi karakter kaum Marxis Klasik. Pertama, negara pinggiran yang pra-kapitalis adalah kelompok negara yang tidak dinamis dengan cara produksi Asia, tidak feodal dan dinamis seperti tempat lahirnya kapitalisme, yaitu Eropa. Kedua, negara pinggiran akan maju ketika telah disentuh oleh negara pusat yang membawa kapitalisme ke negara pinggiran tersebut. Ibaratnya, negara pinggiran

adalah seorang putri cantik yang sedang tertidur, ia akan bangun dan mengembangkan potensi kecantikannya setelah disentuh oleh pangeran tampan. Pangeran itulah yang disebut dengan negara pusat dengan ketampanan yang dimilikinya, yaitu kapitalisme. Pendapat inilah yang kemudian dibantah oleh teori Dependensi. Bantahan teori Dependensi atas pendapat kaum Marxis Klasik ini juga ada dua hal. Pertama, negara pinggiran yang pra-kapitalis memiliki dinamika tersendiri yang berbeda dengan dinamika negara kapitalis. Bila tidak mendapat sentuhan dari negara kapitalis yang telah maju, mereka akan bergerak dengan sendirinya mencapai kemajuan yang diinginkannya. Kedua, justru karena dominasi, sentuhan dan campur tangan negara maju terhadap negara Dunia Ketiga, maka negara pra-kapitalis menjadi tidak pernah maju karena tergantung kepada negara maju tersebut. Ketergantungan tersebut ada dalam format “neo-kolonialisme” yang diterapkan oleh negara maju kepada negara Dunia Ketiga tanpa harus menghapuskan kedaulatan negara Dunia Ketiga, (Arief Budiman, 2000:62-63). Teori Dependensi kali pertama muncul di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini lebih merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh ECLA (United Nation Economic Commission for Latin Amerika) pada masa awal tahun 1960-an. Lembaga tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mampu menggerakkan perekonomian di negara-negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori Modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa.

Teori Dependensi juga lahir atas respon ilmiah terhadap pendapat kaum Marxis Klasik tentang pembangunan yang dijalankan di negara maju dan berkembang. Aliran neo-marxisme yang kemudian menopang keberadaan teori Dependensi ini. Tentang imperialisme, kaum Marxis Klasik melihatnya dari sudut pandang negara maju yang melakukannya sebagai bagian dari upaya manifestasi Kapitalisme Dewasa, sedangkan kalangan Neo-Marxis melihatnya dari sudut pandang negara pinggiran yang terkena

akibat penjajahan. Dalam dua tahapan revolusi, Marxis Klasik berpendapat bahwa revolusi borjuis harus lebih dahulu dilakukan baru kemudian revolusi proletar. Sedangkan Neo-Marxis berpendapat bahwa kalangan borjuis di negara terbelakang pada dasarnya adalah alat atau kepanjangan tangan dari imperialis di negara maju. Maka revolusi yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan di negara pinggiran, terlebih lagi, revolusi tersebut tidak akan mampu membebaskan kalangan proletar di negara berkembang dari eksploitasi kekuatan alat-alat produksi kelompok borjuis di negara tersebut dan kaum borjuis di negara maju.

Tokoh utama dari teori Dependensi adalah Theotonio Dos Santos dan Andre Gunder Frank. Theotonio Dos Santos sendiri mendefinisikan bahwa ketergantungan adalah hubungan relasional yang tidakimbang antara negara maju dan negara miskin dalam pembangunan di kedua kelompok negara tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemajuan negara Dunia Ketiga hanyalah akibat dari ekspansi ekonomi negara maju dengan kapitalismenya. Jika terjadi sesuatu negatif di negara maju, maka negara berkembang akan mendapat dampak negatifnya pula. Sedangkan jika hal negatif terjadi di negara berkembang, maka belum tentu negara maju akan menerima dampak tersebut. Sebuah hubungan yang tidakimbang. Artinya, positif-negatif dampak berkembang pembangunan di negara maju akan dapat membawa dampak pada negara, (theotonio dos santos, review, vol. 60, 231). Dalam perkembangannya, teori Dependensi terbagi dua, yaitu Dependensi Klasik yang diwakili oleh Andre Gunder Frank dan Theotonio Dos Santos, dan Dependensi Baru yang diwakili oleh F.H. Cardoso.

Teori Ketergantungan yang dikembangkan pada akhir 1950an di bawah bimbingan Direktur Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin, Raul Prebisch. Prebisch dan



rekan-rekannya di picu oleh kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri maju tidak harus menyebabkan pertumbuhan di negara-negara miskin. Memang, studi mereka menyarankan bahwa kegiatan ekonomi di negara-negara kaya sering menyebabkan masalah ekonomi yang serius di negara-negara miskin. Kemungkinan seperti itu tidak diprediksi oleh teori neoklasik, yang diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi bermanfaat bagi semua, bahkan jika tidak bermanfaat tidak selalu ditanggung bersama. Penjelasan awal Prebisch untuk fenomena ini sangat jelas: negara-negara miskin mengeksport komoditas primer ke negara-negara kaya yang kemudian diproduksi produk dari komoditas tersebut dan mereka jual kembali ke negara-negara miskin. Tiga masalah membuat kebijakan ini sulit untuk diikuti. Yang pertama adalah bahwa pasar internal negara-negara miskin tidak cukup besar untuk mendukung skala ekonomi yang digunakan oleh negara-negara kaya untuk menjaga harga rendah. Isu kedua menyangkut akan politik negara-negara miskin untuk apakah transformasi menjadi produsen utama produk itu mungkin atau diinginkan. Isu terakhir berkisar sejauh mana negara-negara miskin sebenarnya memiliki kendali produk utama mereka, khususnya di bidang penjualan produk-produk luar negeri. Hambatan-hambatan dengan kebijakan substitusi impor menyebabkan orang lain berpikir sedikit lebih kreatif dan historis pada hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.

Pada titik ini teori ketergantungan itu dipandang sebagai sebuah cara yang mungkin untuk menjelaskan kemiskinan terus-menerus dari negara-negara miskin. Pendekatan neoklasik tradisional mengatakan hampir tidak ada pada pertanyaan ini kecuali untuk menegaskan bahwa negara-negara miskin terlambat datang ke praktik-praktik ekonomi yang padat dan begitu mereka mempelajari teknik-teknik ekonomi modern,

maka kemiskinan akan mulai mereda. Ketergantungan dapat didefinisikan sebagai suatu penjelasan tentang pembangunan ekonomi suatu negara dalam hal pengaruh eksternal - politik, ekonomi, dan budaya - pada kebijakan pembangunan nasional (Osvaldo Sunkel, "Kebijakan Pembangunan Nasional dan Eksternal Ketergantungan di Amerika Latin," Jurnal Studi Pembangunan, Vol 6,. no. 1 Oktober 1969, hal23).

1. Raul Prebisch : industri substitusi import. Menurutnya negara-negara terbelakang harus melakukan industrialisasi yang dimulai dari industri substitusi impor.
2. Perdebatan tentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini muncul untuk menjawab pertanyaan tentang apa alasan bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspansi dan menguasai negara-negara lain secara politisi dan ekonomis. Ada tiga teori:
  - a. Teori God: Adanya misi menyebarkan agama.
  - b. Teori Glory: Kehausan akan kekuasaan dan kebesaran.
  - c. Teori Gospel: Motivasi demi keuntungan ekonomi.
3. Paul Baran: Sentuhan Yang Mematikan Dan Kretinisme. Baginya perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran beda dengan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran, system kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme yang membuat orang tetap kerdil.

Ada 2 tokoh yang membahas dan menjabarkan pemikirannya sebagai kelanjutan dari tokoh-tokoh di atas, yakni:

- a. Andre Guner Frank : Pembangunan keterbelakangan. Bagi Frank keterbelakangan hanya dapat diatasi dengan revolusi, yakni revolusi yang melahirkan sistem sosialis.

b. Theotonia De Santos : Membantah Frank. Menurutnya ada 3 bentuk ketergantungan, yakni :

- i. Ketergantungan Kolonial: Hubungan antar penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif
- ii. Ketergantungan Finansial Industri: pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial industri.
- iii. Ketergantungan Teknologis-Industrial: penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi industri.

Enam bagian pokok dari teori independensi adalah :

- 1) Pendekatan Keseluruhan Melalui Pendekatan Kasus. Gejala ketergantungan dianalisis dengan pendekatan keseluruhan yang memberi tekanan pada sistem dunia. Ketergantungan adalah akibat proses kapitalisme global, dimana negara pinggiran hanya sebagai pelengkap. Keseluruhan dinamika dan mekanisme kapitalis dunia menjadi perhatian pendekatan ini.
- 2) Pakar Eksternal Melawan Internal. Para pengikut teori ketergantungan tidak sependapat dalam penekanan terhadap dua faktor ini, ada yang beranggapan bahwa faktor eksternal lebih ditekankan, seperti Frank Des Santos. Sebaliknya ada yang menekan faktor internal yang mempengaruhi/ menyebabkan ketergantungan, seperti Cordosa dan Faletto.
- 3) Analisis Ekonomi Melawan Analisis Sosiopolitik. Raul Plebiech memulainya dengan memakai analisis ekonomi dan penyelesaian yang ditawarkan juga bersifat ekonomi. AG Frank seorang ekonom, dalam analisisnya memakai disiplin ilmu sosial lainnya, terutama sosiologi dan politik. Dengan demikian teori ketergantungan dimulai

sebagai masalah ekonomi kemudian berkembang menjadi analisis sosial politik dimana analisis ekonomi hanya merupakan bagian dan pendekatan yang multi dan interdisipliner analisis sosiopolitik menekankan analisa kelas, kelompok sosial dan peran pemerintah di negara pinggiran.

- 4) Kontradiksi Sektoral/Regional Melawan Kontradiksi Kelas. Salah satu kelompok penganut ketergantungan sangat menekankan analisis tentang hubungan negara-negara pusat dengan pinggiran ini merupakan analisis yang memakai kontradiksi regional. Tokohnya adalah AG Frank. Sedangkan kelompok lainnya menekankan analisis kelas, seperti Cardoso.
- 5) Keterbelakangan Melawan Pembangunan. Teori ketergantungan sering disamakan dengan teori tentang keterbelakangan dunia ketiga. Seperti dinyatakan oleh Frank. Para pemikir teori ketergantungan yang lain seperti Dos Santos, Cardoso, Evans menyatakan bahwa ketergantungan dan pembangunan bisa berjalan seiring. Yang perlu dijelaskan adalah sebab, sifat dan keterbatasan dari pembangunan yang terjadi dalam konteks ketergantungan.
- 6) Voluntarisme Melawan Determinisme. Penganut marxis klasik melihat perkembangan sejarah sebagai suatu yang deterministic. Masyarakat akan berkembang sesuai tahapan dari feodalisme ke kapitalisme dan akan kepada sosialisme. Penganut Neo Marxis seperti Frank kemudian mengubahnya melalui teori ketergantungan. Menurutnya kapitalisme negara-negara pusat berbeda dengan kapitalisme negara pinggiran. Kapitalisme negara pinggiran adalah keterbelakangan karena itu perlu di ubah menjadi negara sosialis melalui sebuah revolusi. Dalam hal ini Frank adalah penganut teori voluntaristik.

- **Teori Sistem Dunia**

Teori sistem dunia adalah adanya bentuk hubungan negara dalam sistem dunia yang terbagi dalam tiga bentuk negara yaitu negara sentral, negara semi pinggiran dan negara pinggiran. Ketiga bentuk negara tersebut terlibat dalam hubungan yang harmonis secara ekonomis dan kesemuanya akan bertujuan untuk menuju pada bentuk negara sentral yang mapan secara ekonomi. Perubahan status negara pinggiran menuju negara semi pinggiran ditentukan oleh keberhasilan negara pinggiran melaksanakan salah satu atau kombinasi dari Utrategi pembangunan, yaitu strategi menangkap dan memanfaatkan peluang, strategi promosi dengan undangan dan strategi berdiri diatas kaki sendiri. Sedangkan upaya negara Yemi pinggiran menuju negara sentral bergantung pada kemampuan negara semi pinggiran melakukan perluasan pasar serta introduksi teknologi modern. Kemampuan bersaing di pasar Internasional melalui perang harga dan kualitas.

Negara semi pinggiran yang disampaikan oleh Wallerstein merupakan sebuah pelengkap dari konsep sentral dan pinggiran yang disampaikan oleh teori dependensi. Alasan sederhana yang disampaikannya adalah, banyak negara yang tidak termasuk dalam dus kategori tersebut sehingga Wallerstein mencoba menawarkan konsep pembagian dunia menjadi tiga kutub yaitu sentral, semi pinggiran dan pinggiran.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan sistem ekonomi kapitalis dunia saat ini memerlukan kategori semi pinggiran, yaitu dibutuhkannya sebuah perangkat politik dalam mengatasi disintegrasi sistem dunia dan sarana pengembangan modal untuk industri dari negara sentral. Disintegrasi sistem dunia sangat mungkin terjadi sebagai akibat “kecemburuan” negara pinggiran dengan kemajuan yang dialami oleh negara sentral. Kekhawatiran akan timbulnya gejala disintegrasi ini dikarenakan jumlah negara miskin yang sangat banyak harus

berhadapan dengan sedikit negara maju. Solusi yang ditawarkan adalah membentuk kelompok penengah antara keduanya atau dengan kata lain adanya usaha mengurangi disparitas antara negara maju dan negara miskin. Secara ekonomi, negara maju akan mengalami kejenuhan investasi sehingga diperlukan perluasan atau ekspansi pada negara lain. Upaya perluasan investasi ini membutuhkan lokasi baru pada negara miskin. Negara ini kemudian dikenal dengan istilah negara semi pinggiran, Wallerstein mengajukan tesis tentang perlunya gerakan populis berskala nasional digantikan oleh perjuangan kelas berskala dunia. Lebih jauh Wallerstein menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan kebijakan yang merusak tata sistem ekonomi dunia. Alasan yang disampaikan olehnya, antara lain :

1. Impian tentang keadilan ekonomi dan politik merupakan suatu keniscayaan bagi banyak negara.
2. Keberhasilan pembangunan pada beberapa negara menyebabkan perubahan radikal dan global terhadap sistem ekonomi dunia.
3. Strategi pertahanan surplus ekonomi yang dilakukan oleh produsen berbeda dengan perjuangan kelas yang berskala nasional.

- **Pengaruh Teori Sistem Dunia**

Teori sistem dunia telah mampu memberikan penjelasan keberhasilan pembangunan ekonomi pada negara pinggiran dan semi pinggiran. Negara-negara sosialis, yang kemudian terbukti juga menerima modal kapitalisme dunia, hanya dianggap satu unit saja dari tata ekonomi kapitalis dunia. Negara sosialis yang kemudian menerima dan masuk ke dalam pasar kapitalis dunia adalah China, khususnya ketika periode pengintegrasian kembali (Penelitian So dan Cho dalam Suwarsono dan So, 1991). Teori ini yang melakukan analisa dunia secara global, berkeyakinan bahwa tak ada negara yang dapat melepaskan diri dari

ekonomi kapitalis yang mendunia. kapitalisme yang pada awalnya hanyalah perubahan cara produksi dari produksi untuk dipakai ke produksi untuk dijual, telah merambah jauh jauh menjadi dibolehkannya pemilikan barang sebanyakbanyaknya, bersama-sama juga mengembangkan individualisme, komersialisme, liberalisasi, dan pasar bebas. Kapitalisme tidak hanya merubah cara-cara produksi atau sistem ekonomi saja, namun bahkan memasuki segala aspek kehidupan dan pranata dalam kehidupan masyarakat, dari hubungan antar negara, bahkan sampai ke tingkat antar individu. Sehingga itulah, kita mengenal tidak hanya perusahaan-perusahaan kapitalis, tapi juga struktur masyarakat dan bentuk negara.

#### **D. SEJARAH TEORI PEMBANGUNAN**

Sejarah konsep pembangunan berawal dari analisis perubahan sosial yang banyak dikaji oleh para ilmuwan dan pemikir sosial sejak abad ke-18. Sebelum abad ke-18, — perubahan sosial tidak umum dikaji karena masyarakat hidup dengan cara yang kurang lebih—sama selama berabad-abad karena pengertian mereka tentang waktu dan ruang terikat dengan komunitas mereka dan tanah air mereka (Thomas, 2009). Cara hidup dan berpikir tradisional ini mulai berubah ditandai oleh dua kejadian: yaitu Revolusi Perancis yang menyuarkan kebebasan individu dan Revolusi Industri yang mengedepankan modernitas (Thomas, 2009). Perubahan ini Menghasilkan gejolak politik, ekonomi, keilmuan dan sosial yang kemudian dianalisis oleh para Pemikir seperti Karl Marx, Friedrich Engels, Max Weber, Emile Durkheim, Auguste Comte, Robert Spencer dan lain-lain (Roberts dan Hite, 2000: Thomas, 2009). Walaupun analisis mereka berbeda, namun para pemikir ini dapat melihat suatu fenomena yang sama, yaitu terjadi geseran tajam dalam masyarakat dari yang tadinya agraris menjadi industrialis — atau dengan kata lain, dari tradisional berubah menjadi modern. Bagi Marx dan juga Engels, perubahan berarti revolusi yang mengakhiri konflik

kelas antara borjuis dan proletar dan mentransformasi kapitalisme menjadi tatanan sosial baru berlandaskan sosialisme (Marx dan Engels, 2000). Bagi Weber—yang melihat perubahan dari yang menghargai tradisi menjadi lebih menghargai praktek obyektif seperti kontrak tertulis, prosedur yang disepakati, keahlian, dan sebagainya—mengedepankan rasionalitas sebagai cara mencapai modernitas, misalnya dengan investasi kekayaan, kerja keras, efisiensi, dan struktur birokrasi yang ketat (Weber, 2000). Sedangkan bagi Durkheim, perubahan terjadi pada proses pembagian kerja (division of labour) dari masyarakat tradisional dimana pembagian kerja tidak spesifik, menjadi masyarakat modern dimana pembagian kerja menjadi lebih spesifik dan terdiferensiasi (Durkheim, 2000). Teori pembangunan era pembangunan masa kini pada dasarnya merupakan pengembangan dari atau berbasis pada ketiga teoritis yang dibahas sebelumnya: Marx, Weber dan Durkheim.

### **Modernisasi sebagai Paradigma Dominan**

Era pembangunan masa kini digambarkan sebagai pembangunan pada abad ke-20 yang Dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Gejolak sosial dan politik dunia terjadi pada masa tersebut setelah era kolonialisme berakhir dan negara-negara baru bermunculan dari wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin yang sebelumnya terjajah tersebut. Negara-negara baru ini kemudian tergabung dalam Gerakan Non Blok yang diinisiasi dalam KTT Non Blok tahun 1955 di Indonesia. Selanjutnya, negara-negara yang tidak beraliansi dengan Amerika Serikat yang kapitalis (Dunia Pertama) maupun Uni Soviet yang komunis (Dunia Kedua) ini diklasifikasikan sebagai Dunia Ketiga (Sumner dan Tribe, 2008). Negara-negara Dunia Ketiga ini umumnya penduduk miskin yang tinggal di wilayah pedesaan (McMichael, 2008).

Pemerintah negara baru ini mulai merancang skema strategi pembangunan dengan bantuan dari Negara penjajah mereka sebelumnya bekerjasama dengan negara maju lainnya,



dimana negara maju ini selain ingin membantu juga memiliki agenda menyusupkan ideologi mereka (kapitalisme vs komunisme) pada negara Dunia Ketiga ini (Dodds, 2013). Pada banyak kasus, Skema pembangunan yang digunakan para pemimpin Dunia Ketiga ini mengambil jalan modernitas yang diambil penjajah mereka dahulu: evolusi dari masyarakat tradisional yang agraris menjadi masyarakat urban yang modern. jalan modernitas yang digunakan sebagai strategi pembangunan dunia ketiga pada era pembangunan di abad ke-20 ini berangkat dari pengaruh industrialisme di Eropa pada abad sebelumnya. Pembangunan, dalam hal ini, berarti pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak dipengaruhi oleh bidang ekonomi politik dan teori ekonomi klasik hingga ke teori ekonomi neoklasik, Keynesian dan neoliberalisme (Peet dan Hartwick, 2009; Pieterse, 2010). Teori ekonomi klasik dipengaruhi oleh Adam Smith, David Ricardo dan Stuart Mills, yang pada dasarnya mengedepankan konsep akumulasi kapital dan pasar bebas sebagai aspek yang sangat penting dalam proses perubahan menuju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Peet dan Hartwick, 2009). Dalam kaitannya dengan pembangunan, pendekatan ini mengindikasikan bahwa kekayaan yang lebih banyak akan menghasilkan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik (Willis, 2005). Para teorisi modernisasi ini memperkenalkan —Darwinisme sosial dimana masyarakat berkembang atau berevolusi melalui beberapa tahapan —tangga pembangunan! (Verhelst, 1990:11; Webster, 1990; McMichael, 2008:43). —Tangga pembangunan! ini dipostulasikan oleh Walt Rostow melalui tulisan yang dipublikasikan tahun 1960 dimana menurutnya pembangunan terbagi dalam lima tahapan: 1) tahap perekonomian tradisional, 2) tahap prakondisi tinggal landas, 3) tahap tinggal landas, 4) tahap menuju kedewasaan, 5) tahap konsumsi massa tinggi (Restiyanto dan Yusroni, 2006). Bagi Rostow, hanya ada satu jalan menuju pembangunan, yaitu melalui lima tahapan tersebut yang pada tahap akhir dikarakterisasikan dengan kemampuan masyarakat untuk mampu menjadi konsumen berbagai produk industri dibandingkan dengan mempraktekkan ekonomi tradisional,

sehingga bergeser dari masyarakat agraris menjadi masyarakat urban (McMichael, 2008). Dengan kata lain, teori modernisasi beresensikan mengubah yang —tradisionall menjadi —modemnl.

Oleh para ahli strategi pembangunan pada dekade 1950an sampai dengan 1960an, modernisasi menjadi paradigma dominan dalam pembangunan. Pada perkembangannya, diturunkan menjadi Paham neoliberalisme yang mulai dominan pada tahun 1980an, dimana neoliberalisme tersebut memperkenalkan reformasi struktural, liberalisasi dan privatisasi sebagai jalan menuju modernitas (Pieterse, 2010). Walaupun menjadi paradigma dominan, jalan modernitas atau modernisasi ini banyak dikritik karena dianggap tidak sensitif terhadap berbagai perbedaan yang Ada pada masyarakat yang menjadi target pembangunan tersebut. Dalam teori modernisasi, kondisi yang menghambat pembangunan datang dari dalam masyarakat itu sendiri, sehingga oleh para kritik dianggap menyalahkan para target pembangunan dibandingkan memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya yang kemungkinan dapat berkontribusi dalam menghambat proses pembangunan masyarakat tersebut.

## **E. PEMBANGUNAN YANG TEPAT DITERAPKAN DI INDONESIA**

Teori pembangunan yang dibahas sebelumnya mengalami beberapa kritikan karena pada prakteknya belum dapat memperbaiki kondisi negara berkembang dan miskin menjadi lebih baik. Untuk menganalisis hal ini, kita kembali pada definisi pembangunan, dimana pembangunan kurang lebih merupakan —sinonim untuk perubahan sosial dan ekonomi yang direncanakanl (Hobart, 1993:1). Dalam pembahasan ini, definisi ini dipecah menjadi tiga bagian: —perubahan yang direncanakanl, —perubahan sosiall dan —perubahan ekonomil.

Yang mencirikan pembangunan dari hana sekedar perubahan sosial atau ekonomi adalah bahwa pembangunan itu —direncanakanl. Perencanaan pembangunan menjadi area penelitian yang populer setelah Perang Dunia Kedua (Waterston, 2006). Bidang ini muncul karena ilmu kebijakan publik dan administrasi yang konvensional — dalam hal ini yang dipraktekkan negara maju — tidak tepat untuk diaplikasikan pada negara berkembang yang baru terbentuk (Forsyth, 2005). Pemerintah sebagai perwakilan dan otoritas dari negara dan juga badan pembangunan internasional menjadi aktor utama dalam perencanaan pembangunan. Ironisnya, meskipun teori membahas bagaimana pembangunan harus dilakukan di negara berkembang, teori ini dirancang oleh teoris dan praktisi dari negara maju, sehingga kebijakan perdagangan dan bantuan internasional terkait pembangunan masih diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar kapitalis.

Berkaitan dengan itu, dapat kita katakan bahwa pemikiran negara maju atau Barat ini berkontribusi pada aspek —perubahan ekonomi dari pembangunan. Sejalan dengan teori modernisasi, negara berkembang dianggap hanya dapat memperoleh kemajuan jika sampai pada keadaan yang sedang dialami negara maju. Cara mencapainya adalah dengan perubahan ekonomi. Seperti yang dikemukakan McMichael (2008:46) bahwa pembangunan mengindikasikan pengertian ekonomi dari perubahan sosial, menjadi rumus sebagai budaya pasar yang sama untuk semua dan digerakkan oleh pertumbuhan ekonomi. Implikasinya adalah indikator yang dihitung pada skala nasional seperti produk domestik bruto digunakan untuk menghitung level pembangunan suatu bangsa (Forsyth, 2005, McMichael, 2008). Pengertian pembangunan yang seperti ini memberi jalan yang lebar bagi para kapitalis untuk turut dalam upaya pembangunan, dan menjadikan pembangunan lebih dipengaruhi politik karena pada akhirnya diukur dengan skala nasional. Seringnya, aspek ekonomi ini begitu dihargai sehingga aspek sosial dikesampingkan.

Pengabaian terhadap aspek sosial dalam pembangunan merupakan sebuah paradoks karena pembangunan pada dasarnya adalah —perubahan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial jelas berkaitan, tetapi pertumbuhan ekonomi tidak harus menjadi prekursor untuk pembangunan sosial. Hal ini diindikasikan dalam studi yang meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di 46 negara berkembang selama empat dekade: hasil menunjukkan bahwa pembangunan sosial memberikan dampak signifikan terhadap baik perkembangan sosial maupun pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap perbaikan sosial (Newman dan Thomson, 1989). Seringnya aspek sosial ini diabaikan atas dasar kemudahan, dalam arti mengukur indikator sosial dan budaya merupakan tugas yang lebih sulit daripada mengukur indikator ekonomi yang numerik (Willis, 2005). Sehingga pendekatan yang digunakan adalah lebih teknis dan mengabaikan aspek manusia.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa masalah dalam pendekatan pembangunan dominan yang membuatnya menjadi kurang efektif. Pertama, teori, pemikiran dan metode yang berasal dari Barat terkait dengan perencanaan pembangunan pada negara non-Barat ternyata tidak berhasil. Kedua, masalah ini berkaitan dengan pemikiran perubahan ekonomi berada di atas Perubahan sosial. Kepentingan tersembunyi yang ada di balik berbagai upaya pembangunan, Misal dari donor ataupun pemerintah, seringnya membuat masyarakat akar rumput yang harusnya menjadi jantung upaya tersebut menjadi tersingkirkan (Adams dan Solomon, 1991).

Dengan demikian, pada praktek pembangunan, masyarakat harus ditempatkan sebagai jantung Setiap upaya pembangunan. Masyarakat, dalam hal ini, setiap manusia yang terlibat upaya Pembangunan tersebut, tetapi umumnya mengacu pada masyarakat akar rumput yang menjadi target pembangunan. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai pembangunan partisipatif, yang merupakan pendekatan bottom-up dan berpusat pada manusia yang

bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh dari masyarakat pada level akar rumput (Forsyth, 2005:506). Prinsip pembangunan partisipatif dipengaruhi oleh Paulo Freire yang mulai berkembang pada tahun 1970an (Huesca, 2003). Freire berpendapat bahwa pembangunan pada dasarnya adalah mencapai pembebasan dari ketertindasan, dan menekankan pada pentingnya komunikasi dialogis yang horizontal untuk mencapai kemandirian atau self-reliance (Servaes, 1999: Melkote dan Steeves, 2001). Teori —catchingup dan —trickle-down menjadi tidak relevan karena dianggap sebagai penyebab dari kegagalan pembangunan. Dalam proses perencanaan menggunakan pendekatan partisipatif ini, penyusunan kebijakan harus ditujukan untuk masyarakat target (Hobart, 1993). Praktisi pembangunan harus melihat masyarakat target sebagai individu yang bertindak sebagai —agen kompleks — kompleks, dalam arti mereka adalah —sebagian agen, sebagian pasien dan sebagian instrumen dan dapat dengan sukarela dan secara aktif berubah peran diantara ketiga peran tersebut (Phillips dan Edwards, 2000:48). Maka, masyarakat target perlu dijadikan inti setiap upaya pembangunan.

Menjadikan masyarakat target inti dari upaya pembangunan berarti mengakui mereka dalam hal siapa mereka dan dari mana mereka. Manusia di seluruh dunia dapat bertahan hidup dengan berbagai cara hidup yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Mereka kaya akan pengetahuan tentang bagaimana bertahan hidup, tidak memandang asal-usul mereka — Barat atau tidak. Tetapi seringkali, pengetahuan atau kearifan lokal ini dilihat sebagai bentuk keterbelakangan atau penghambat bagi pembangunan yang lebih baik diabaikan (Hobart, 1993: Verhelst, 1990). Ingram (1994) berpendapat bahwa terdapat konsensus menyatakan pembangunan bersifat endogen, dan perubahan dapat terjadi dan terus berlanjut (sustainable) hanya jika proses tersebut konsisten dan dicocokkan terhadap sejarah dan daerah masyarakat target. Sedangkan menurut Verhelst (1990), pembangunan adalah proses yang berbasis pada budaya. Kegagalan menempatkan budaya sebagai sesuatu yang penting dalam pembangunan

menghasilkan bencana dan mendukung kepunahan suatu masyarakat alih-alih memperbaikinya.

Berdasarkan analisis ini, maka diperkenalkanlah konsep pembangunan yang tepat. Konsep ini berkembang dari pemikiran bahwa masalah pembangunan disebabkan oleh pengenalan teknologi yang tidak tepat guna dari negara Barat (Webster, 1990). Jenis teknologi sebagai sarana pembangunan dalam komunitas lokal harus merupakan teknologi tepat guna yang cocok bagi kondisi sosial, lingkungan dan budaya mereka, sehingga menciptakan selfreliance atau kemandirian dan keberlanjutan dalam kehidupan mereka. Self-reliance berarti terbebas dari segala bentuk ekstraversi dan ketergantungan, sehingga mempertahankan identitas dari setiap orang atau komunitas lokal (Verhelst, 1990).

Konsep pembangunan yang tepat berarti tidak ada jalan yang sama dalam pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan bersifat pluralistik dan harus dilihat sebagai multiplisitas atau keserbaragaman pendekatan berdasarkan konteks dan kebutuhan mendasar (basic felt needs) serta keberdayaan dari sektor paling tertindas dalam beragam masyarakat di level yang berbedabeda (Servaes, 2008, Melkote dan Steeves, 2001). Pusat dari teori multiplisitas ini adalah komunikasi partisipatif. Pembangunan partisipatif mengacu pada proses pembangunan yang melibatkan semua orang, dengan memfokuskan pada partisipasi warga pada level akar rumput. Dalam hal ini, pembangunan partisipatif lebih mengarah pada banyak pendekatan (a multiplicity Of approaches) yang non-linear, horizontal dan bersifat plural, berdasarkan konteks, keinginan, keperluan dan pemberdayaan masyarakat yang tertindas dalam level berbeda-beda (Melkote, 2003: Servaes, 2008). Tujuan dari pembangunan partisipatif ini adalah memfasilitasi penyadaran kolektif dimana komunitas menjadi berdaya untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan dan rencana untuk kesejahteraan mereka sendiri (Melkote, 2003). Ciri-ciri pembangunan berdasarkan konsep baru ini antara lain: tindakan berdasarkan kebutuhan termasuk kebutuhan nonmateriil seperti

kesetaraan sosial, demokrasi, dan sebagainya: pembangunan bersifat endogen dan otonom (perubahan berdasarkan definisi masyarakat tentang sumber daya yang ada dalam masyarakat itu sendiri), perlindungan terhadap lingkungan (penggunaan potensi yang rasional dalam batasan ekosistem lokal), merupakan upaya untuk menciptakan transformasi struktural dari hubungan sosial, kegiatan ekonomi dan struktur kekuasaan: dan pembangunan sebagai pelaksanaan dan dukungan demokrasi partisipatif dalam segala level Masyarakat (Bessette, 1996).

Apapun istilahnya, pembangunan yang tepat, bottom-up, trickle-up, akar rumput, partisipatif serbaragam, pluralistik maupun alternatif, pendekatan pembangunan yang seperti ini lebih dianggap efektif dibandingkan pengertian pembangunan sebagai —catching-upl. Keterlibatan Semua orang dianggap menghasilkan pemberdayaan dan kemandirian dan pada akhirnya keberlanjutan. Walaupun perlu diperhatikan bahwa pemikiran pembangunan seperti ini juga memiliki beberapa syarat agar efektif.

Sebenarnya pemikiran pembangunan partisipatif tidak terlalu asing maupun baru. Sejarahnya berawal dari tahun 1950an dengan adanya gerakan advokasi pembangunan masyarakat desa, dan baru divicarakan di bidang studi pembangunan pada tahun 1970an (Forsyth, 2005). Jadi pembangunan partisipatif bukan hal yang baru dan diakui sebagai jawaban dari masalah pembangunan, tetapi pertanyaan yang muncul adalah: seberapa — partisipatifnya pembangunan partisipatif?

Pembangunan partisipatif, walaupun terdengar sangat optimis dan memberdayakan, pada kenyataan tidak begitu banyak diberitakan kesuksesannya pada praktek pembangunan. Dengan kata lain, pendekatan partisipatif pada pembangunan lebih banyak di atas kertas dan tidak dipraktekkan di lapangan (van Ufford, 1993). Pembangunan partisipatif hanya menjadi prosedur atau syarat yang dipenuhi dan praktisi pembangunan tetap mengutamakan

keahliannya dibandingkan pengetahuan masyarakat lokal. Sebagai contoh, Riyandari (2014) meneliti pengembangan media partisipatoris dalam pembangunan pertanian dan mendapati bahwa keterlibatan petani pada pengembangan media partisipatoris ini justru malah bertujuan untuk mendisiplinkan dan mengatur para petani tersebut. Sehingga, dalam hal ini, partisipasi menjadi manipulatif dan instrumental dan kehilangan kapasitas transformatifnya untuk menginisiasi perubahan (Riyandari, 2014). Willis (2005) berpendapat bahwa agar menjadi benar-benar partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam menyusun agenda suatu upaya pembangunan, dibandingkan orang luar memaksakan prioritas mereka ke masyarakat lalu bekerjasama dengan masyarakat lokal untuk mencapainya. Dengan demikian, masyarakat lokal memiliki rasa berkuasa dan pengaruh, sehingga dapat menuju pemberdayaan. Hal ini berarti suatu upaya pembangunan wajib memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk didengar.

Memberikan suara kepada masyarakat lokal tidak semudah kedengarannya. Selain disebabkan beberapa alasan yang dideskripsikan sebelumnya, terdapat satu hal lagi yang patut dibahas. Relasi kekuasaan para stakeholder pembangunan: donor, LSM, pemerintah baik nasional maupun daerah. Konflik kepentingan dan relasi sosial yang kompleks dapat menghambat terlaksananya pembangunan partisipatif, Tanpa pemahaman tentang hubungan sosial dan budaya lokal, penerapan partisipasi untuk segala populasi dalam implementasi upaya pembangunan justru menjadi kontraproduktif (Webster, 1990, Willis, 2005). Dengan demikian, pembangunan partisipatif tidak hanya diartikan sebagai melibatkan semua orang secara setara, tetapi juga melibatkan pemahaman hubungan sosial dalam masyarakat oleh para praktisi pembangunan dan stakeholder pembangunan lainnya. Dengan kata lain, kondisi sosial dan hubungan sosial dari daerah yang menjadi wilayah pembangunan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Maka dari itu, harus dipastikan bahwa pembangunan yang tepat tidak hanya berarti teknologi tepat guna, tetapi juga kebijakan, pendekatan dan bahkan iklim



yang tepat pula. Kegagalan memperhatikan hal-hal tersebut dapat menghasilkan hasil yang buruk dalam jangka panjang, namun jika hal-hal tersebut diterapkan maka dapat menuju kemajuan, seperti yang akan diilustrasikan dalam studi kasus selanjutnya.

- **PENERAPAN TEORI PEMBANGUNAN DI INDONESIA**

Kata “development” diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi — pembangunan. Istilah pembangunan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam rencana pembangunan nasional (Hobart, 1993: King, 1999). Kebijakan pembangunan di Indonesia dalam sejarahnya berkaitan dengan prinsip Barat (King, 1999). Kebijakan pembangunan Indonesia dirancang pada tahun 1960an oleh ekonom lulusan Barat yang dinamakan Mafia Berkeley” dengan bantuan penasehat asing, dan membentuk ekonomi nasional menjadi neoliberal (King, 1999: Yasui, 2003). Beberapa figur utama dalam Mafia Berkeley beserta jabatannya saat itu antara lain Widjojo Nitisastro (lulusan University of California, Berkeley) sebagai Kepala BAPPENAS, Ali Wardhana (UC Berkeley) sebagai Menteri Keuangan, Mohammad Sadli (lulusan MIT dan UC Berkeley) sebagai Menteri Tenaga Kerja, Emil Salim (lulusan UC Berkeley) sebagai Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas, dan Subroto (lulusan McGill University) sebagai Dirjen Pemasaran Departemen Perdagangan dan kemudian Menteri Transmigrasi dan Koperasi (Yasui, 2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia kala itu, pembangunan berarti modernisasi. Pembangunan jalan, sekolah, bendungan dan lain-lain menjadi prioritas kebijakan pembangunan utama.

Pembangunan bendungan raksasa di Jawa Tengah adalah salah satu proyek pembangunan yang memenuhi rencana pembangunan nasional, walaupun kasusnya sudah lama terjadi, tetapi tetap menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam proyek pembangunan

bendungan di dunia. Waduk Kedung Ombo yang areanya mencakup 3 wilayah kabupaten yaitu Sragen, Boyolali dan Grobogan, dibangun untuk mengirigasi 60.000 hektar lahan pertanian, menghasilkan 225 megawatt listrik, mengendalikan banjir, menyediakan air bagi 300 desa dan kota, dan juga untuk pariwisata (Budiman, 1995; Lucas, 1992, McCully, 1994). Proyek yang pembangunannya sebagian besar didanai oleh Bank Dunia ini membutuhkan pembebasan tanah sebanyak 5989 hektar yang mengakibatkan pemindahan dan transmigrasi hampir 6000 Kepala Keluarga (KK) dari 22 desa (Budiman, 1995).

Atas nama pembangunan, kepentingan dan kehidupan para masyarakat ini dikorbankan. Mereka dipaksa pindah keluar daerah dan bertransmigrasi ke Sumatra atau pindah ke desa tetangga (Budiman, 1995). Ganti rugi yang diperoleh amat rendah, hanya sepersepuluh dari harga jual semestinya (Budiman, 1995; Rumansara, 1998). Pada tahun 1981 konstruksi dimulai dan masyarakat mulai dipindahkan pada periode 1985-1986. Mereka enggan pindah karena ketidakpastian akan kehidupan yang lebih baik di daerah baru karena transmigrasi kurang populer dan desa tetangga yang menjadi tujuan kering dan tidak subur, ditambah pula nilai ganti rugi yang tidak layak (Budiman, 1995; McCully, 1994). Karena tidak berhasil dibujuk untuk pindah, pemerintah menggunakan pemaksaan dan kekerasan dengan memaksa penduduk menandatangani dokumen menggunakan cap jempol dan yang menolak akan dianiaya oleh militer (Henschke, 2007). Waduk Kedung Ombo diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1991 dengan 600 KK masih tinggal di wilayah sabuk hijau diatas garis batas air bendungan, dimana Presiden RI mengakui kesulitan yang dialami penduduk dalam meninggalkan kampung halaman tetapi harus berkorban demi kebaikan yang lebih besar (Lucas, 1992).

Tragedi yang terjadi pada kasus Kedung Ombo ini disebabkan oleh kegagalan memperhatikan isu sosial pada proyek tersebut. AMDAL (yang termasuk analisis dampak sosial) untuk proyek ini baru dilakukan tahun 1984, meskipun konstruksi sudah dimulai tiga tahun sebelumnya dan Rencana pembangunan telah dirancang jauh lebih dulu (Budiman, 1995; Rumansara, 1998). Para penduduk tidak dikonsultasikan tentang proyek ini sehingga mereka tidak sadar bagaimana proyek tersebut dapat berdampak bagi mereka (McCully, 1994). Hasilnya, mereka yang dipindahkan bermasalah dengan lahan yang tidak subur, yang bertransmigrasi mengalami konflik dengan penduduk lokal, dan isu sosial lain juga muncul (Stanley, 1993). Sampai hari ini, terdapat sekitar 97 KK yang tinggal di sabuk hijau bendungan yang diakui pemerintah sebagai penduduk ilegal karena tinggal di atas aset negara yang dianggap berbahaya jika digunakan untuk pertanian (Henschke, 2007). Setelah runtuhnya rezim Soeharto, aktivis Kedung Ombo berupaya melobi pemerintah untuk memperoleh kompensasi yang layak, tetapi tidak berhasil (Henschke, 2007). Sekarang mereka dan penduduk yang terdampak kasus ini menolak berdialog dengan pemerintah, karena takut kehidupan mereka akan lebih buruk lagi — saking hampir kehilangan segalanya, mereka tidak punya pilihan lain (Budiman, 1995). Waduk Kedung Ombo sekarang merupakan simbol dari pencapaian besar pembangunan dalam mensejahterakan daerah dan masyarakatnya, tetapi bagi mereka yang 30 tahun yang lalu berjuang hidup-mati demi pembangunan danau raksasa ini, Waduk Kedung Ombo merupakan pengingat akan konsekuensi keras dari pembangunan dimana kehidupan ribuan penduduk terancam dan tercerabut dari akarnya demi —kebaikan yang lebih besar.

Sekitar 60 km dari Waduk Kedung Ombo berdiri Desa Kalibening yang sebagian besar penduduknya mencari penghidupan dari pertanian. Masyarakat bertani ini telah mengambil langkah menuju pemberdayaan. Mereka mau berkembang dan merangkul pembangunan dan kaya akan pengetahuan dan jauh dari keterbelakangan — dengan menjadi sadar akan peran

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan pendidikan dalam memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Mereka pun menyesuaikan TIK ini sehingga menjadi tepat guna dalam konteks lokal mereka. Sehingga, setelah pertemuan warga desa yang diinisiasi oleh aktivis dari serikat paguyuban petani, mereka mendirikan SMP Alternatif Oaryah Thayyibah yang kemudian berubah menjadi Komunitas Belajar Garyah Thayyibah (Yasya, 2009).

Komunitas Belajar Garyah Thayyibah (KBOT) sederhananya adalah sekolah yang menyediakan pendidikan menengah untuk anak-anak (SMP dan SMA) dan berkembang menjadi universitas. Namun para pengagas dan mereka yang terlibat dalam KBOT lebih suka menggunakan istilah komunitas belajar! daripada sekolah karena prinsip dan pengoperasian mereka berbeda dengan sekolah pada umumnya: yaitu prinsip pendidikan berbasis komunitas. Definisi komunitas belajar yang diidentifikasi dalam KBOT ini berarti:

Sekelompok orang yang anggota-anggotanya saling belajar dan mengajar secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sehari-hari dan memajukan kehidupan mereka... Jika seluruh anggota masyarakat terus belajar, dapat menyelesaikan kehidupan mereka secara swadaya, dan berhasil mencapai kehidupan yang maju dan sejahtera, mereka bisa dinamakan sebagai masyarakat maju (*advanced society*).I (Prihantoro, 2012:5)

Sedangkan pendidikan berbasis komunitas yang diadopsi KBOT mengandung pengertian bahwa pendidikan harus berasal dari komunitas dan hasilnya dikembalikan kepada komunitas untuk digunakan dalam mengembangkan komunitas itu sendiri. Prinsip pendidikan KBOT adalah: (1) pendidikan yang membebaskan, (2) keberpihakan pada seluruh warga belajar, (3) partisipatif, (4) kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat sekitar, (5) kerja sama, (6) evaluasi yang berpusat pada subyek didik, dan (7) percaya diri (Prihantoro, 2012). Dapat dikatakan

KBOT ini menganut prinsip Freire, dan diakui sendiri oleh baik pendiri maupun nara didik KBOT yang sangat familier dengan teori Freire (Yasya, 2009).

Dalam prakteknya, ini berarti nara didik diberikan kebebasan untuk belajar apa yang mereka inginkan dengan cara mereka sendiri. Tidak ada jadwal pelajaran, semua ditentukan oleh nara didik. Tidak ada kelas tempat belajar, semua wilayah dapat menjadi kelas bagi mereka, di gedung sekolah (Resource Center), masjid, sawah, dan lain-lain. Pendidikan dikelola bersama oleh komunitas yang terdiri dari warga desa, perangkat desa, orangtua, guru, dan nara didik Pembelajaran dimediasi dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dan alam sekitar sebagai laboratorium alami, dengan komponen desa seperti perangkat desa dan warga desa lainnya sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran (Bahruddin, 2007). Hasil pembelajaran tidak dievaluasi dengan ujian tertulis tetapi dalam bentuk karya kreatif seperti karya tulis ilmiah maupun populer, film, musik dan karya seni.

Apa dampak sekolah kecil ini bagi pembangunan pedesaan di wilayah mereka? Para nara didik menjadi kreatif, kritis dan produktif: mereka menjadi penulis, penyanyi, pembuat film dan pengusaha: dengan karya kreatif mereka yang dikomersialkan sehingga menghasilkan royalti (Harsono, 2008). Pendiri KBOT, Bahruddin (2009) mengatakan bahwa —kepercayaan yang diberikan (kepada anak-anak) ternyata berhasil mengembangkan kreativitas anak-anak dan kemampuan mereka berinovasi. Hasil pembelajaran di KBOT telah membangkitkan kesadaran nara didik akan keadaan mereka, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan perubahan baik bagi diri maupun komunitas. Walaupun tidak terlihat sebagai aksi kolektif yang terorganisasi, para alumni" (walaupun di KBQT tidak mengenal istilah alumni, karena semua warga KBQT menjadi pembelajar di KBQT sepanjang hayat) telah melakukan berbagai kontribusi di masyarakat sesuai kemampuan masing-masing. Meminjam istilah Bahruddin, mereka sekarang telah —berproduksil dengan mengeluarkan berbagai karya maupun inovasi. Para warga KBQT ini antara lain berproduksi sebagai

wiraswasta, petani, penulis buku, dan kembali ke KBQT sebagai pendamping adik kelasnya. Para warga KBQT ini tumbuh menjadi individu yang cerdas dan sadar akan potensi diri mereka tetapi tetap menghargai pentingnya asal-usul dan identitas kultural mereka, dan menyadari signifikansi dari hubungan mereka dengan lingkungan dan masyarakat sekitar mereka.

Kasus KBQT ini murni merupakan gerakan akar rumput yang terbebas dari pengaruh penguasa, dalam hal ini pemerintah maupun donor asing. Kalaupun ada, mereka hanya sebagai mitra yang diseleksi secara hati-hati oleh pengelola KBOT agar tidak ada kepentingan tersembunyi yang dapat merugikan KBQT (Prihantoro, 2012). Akan tetapi, di lain pihak, di Indonesia pembangunan desa merupakan salah satu program utama pemerintah. Political will dari pemerintah dalam membangun desa ditunjukkan antara lain dengan terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau lebih dikenal dengan UU Desa (Taryoto, 2014). Dalam UU Desa, kurang lebih menyiratkan konsep pembangunan yang tepat dan berbasis akar rumput serta mengedepankan sistem informasi desa berbasis TIK dan teknologi tepat guna dalam mewujudkan kesejahteraan desa yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan nasional.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Konsep pembangunan merupakan bidang yang terus berubah dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain perubahan zaman, perbedaan wilayah, pandangan atau worldview manusia, dan lainlain. Dengan kata lain, konsep pembangunan dan teori yang menyertainya dapat menjadi pembahasan yang panjang. Oleh karena itu, kajian mengenai konsep pembangunan harus disituasikan terhadap konteksnya, oleh karena definisi pembangunan itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak pasti. Sehingga, dipaparkan beberapa teori utama pembangunan berdasarkan sejarah dari masa ke masa, seperti teori klasik, teori modernisasi, teori keterbelakangan, dan teori pembangunan yang tepat. Teori-teori ini patut dikedepankan karena menjelaskan kondisi pembangunan dunia saat ini.

Dalam analisis kegagalan pembangunan, agaknya disebabkan oleh karena tidak memperhatikan target manusianya, dan pada teori dan prakteknya kurang lebih bersifat monokultur. Ironi pembangunan masyarakat adalah mengesampingkan masyarakat untuk mengedepankan pertimbangan ekonomi dan kepentingan kapitalis lainnya. Masyarakat dianggap sebagai terbelakang yang perlu maju menjadi berada dalam keadaan seperti di Barat. Sehingga, diambillah pendekatan baru yang memerlukan partisipasi semua manusia yang terlibat dalam agenda pembangunan. Dengan cara ini, masyarakat dibawa menuju keadaan berdaya dan mandiri melalui metode pembangunan yang disesuaikan untuk kebutuhan lokal mereka sehingga tepat bagi mereka. Akan tetapi partisipasi sendiri tidak cukup. Terdapat aspek mendasar dari partisipasi antara lain sensitivitas dan pemahaman terhadap daerah dan masyarakat lokal merupakan hal penting dalam pencapaian pembangunan partisipatif penuh.

Dua studi kasus penerapan pendekatan pembangunan di Indonesia dipresentasikan, sebuah proyek pembangunan bendungan yang menerapkan pendekatan teori modernisasi dan menghasilkan konsekuensi tragis: serta proyek pengembangan masyarakat yang sukses dan melibatkan komunitas akar rumput di pedesaan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan mengedepankan partisipasi dalam proyek pembangunan menyebabkan bencana, di lain pihak, komunitas pedesaan yang sering dianggap 'terbelakang' justru dapat mencapai keadaan berdaya dan mandiri dengan cara menghargai lingkungan lokal dan kebutuhan komunitas itu sendiri.

Pembangunan merupakan hal yang harus dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk membangun segala aspek yang ada di negara ini bukanlah hal yang mudah. Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi pola pikir, sebagai satu cara cepat yang dapat digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh komponen bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang tidak pasti, akan ke mana, dan harus bagaimana. Jika revolusi pola pikir dalam membangun dapat diterima dan dipahami dengan baik, maka inovasi sosial dapat diselenggarakan, untuk itu:

1. Orientasi pembangunan harus diubah dari orientasi fisik, ekonomi, dan sektoral ke orientasi peningkatan sumberdaya manusia agar manusia Indonesia dapat menjadi manusia yang mandiri, tanpa tergantung pada pihak manapun, serta mampu mengarahkan dirinya sendiri mencapai kesejahteraan hidupnya.
2. Pendidikan informal, non formal, dan formal dengan segala jenjangnya harus merupakan prioritas utama sebagai upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia.



3. Perekonomian negara perlu segera disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan ini harus dilakukan dalam bentuk nyata, artinya siapapun yang mau mengembangkan usahanya, berhak mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan yang ada.
4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya setiap warganegara secara individu berhak atas hasil kekayaan alam yang secara nyata telah dikelola dan mendapatkan keuntungan, wujud konkritnya dapat diberikan melalui penyelenggaraan tabungan rakyat sebagai pembagian keuntungan pengelolaan kekayaan alam, ini dapat merupakan wujud nyata penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Lembaga Administrasi Negara.

Slamet, Margono.2004. *Materi Kuliah MMT dalam Penyuluhan*.Bogor:Program Studi Ilmu PPN Institut Pertanian Bogor.

Tjitropranoto.Prabowo.2005 *.Materi Kuliah Metoda dan Desain Penelitian Penyuluhan Pembangunan. Program Studi Ilmu PPN*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Todaro.MP.1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta:Penerbit Erlangga.

Mulyadi,Dedy. 2004. *Pembangunan Berbasis Kebudayaan*. *www. purwakarta. go. id* (5 September 2009)

<https://ilmukomunikasium.files.wordpress.com/2017/04/teori-pembangunan.pdf>:

<http://www.dosenpendidikan.com/21-pengertian-pembangunan-menurut-para-ahliterlengkap/>

<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/2003/19pengertian-pembangunan/>

<http://www.butonutara.blogspot.co.id/2011/06/teori-teori-pembangunan.html>